



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BURHANUDDIN
2. Jabatan : KEPALA BIRO UMUM
3. NHK : 637561

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 525.000.000

1. Tanah Seluas 11307 m2 di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI
Rp. 35.000.000
2. Tanah Seluas 17985 m2 di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI
Rp. 40.000.000
3. Tanah Seluas 9776 m2 di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI
Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 654 m2 di KAB / KOTA BANGKA TENGAH, HASIL
SENDIRI Rp. 70.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 711 m2/700 m2 di KAB / KOTA
BANGKA TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
6. Tanah Seluas 12570 m2 di KAB / KOTA BANGKA TENGAH, HASIL
SENDIRI Rp. 90.000.000
7. Tanah Seluas 8687 m2 di KAB / KOTA BANGKA TENGAH, HASIL
SENDIRI Rp. 50.000.000
8. Tanah Seluas 6926 m2 di KAB / KOTA BANGKA TENGAH, HASIL
SENDIRI Rp. 50.000.000
9. Tanah Seluas 197 m2 di KAB / KOTA BANGKA TENGAH, HASIL
SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 120.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 45.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	38.424.841
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	728.424.841
III. HUTANG	Rp.	36.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	692.424.841

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.